

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia serta perkenanNya jualah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

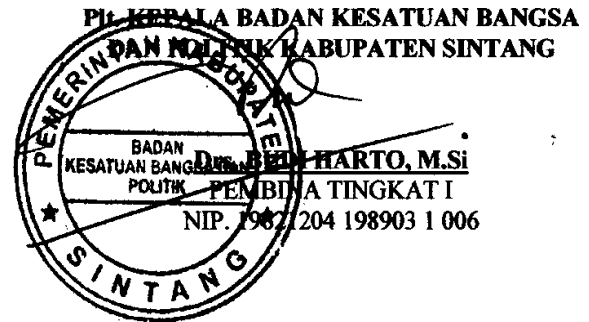
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang dilaksanakan dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Sintang pada akhir Tahun Anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang dalam rangka pencapaian Visi dan Misinya, juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan di masa yang akan datang.

Harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan ini dapat pula digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang terutama dalam pembangunan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sintang serta pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai kinerja dan pertanggung jawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang, dan untuk merumuskan kebijakan yang terarah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sintang.

Sintang, Februari 2020



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahunan atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang Tahun 2019 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. LKJiP melaporkan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) atau dokumen yang dipersamakan dengannya yaitu APBD.

Dalam Tahun Anggaran 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang melaksanakan 10 program kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dalam rangka mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan perkembangan dinamika masyarakat, telah ditetapkan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan di atas, yang dituangkan dalam APBD Tahun 2019.

Mengingat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih cenderung pada level indikator output dan outcomes. Capaian sasaran tahun 2019 berdasarkan indikator yang ditetapkan, sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 4 (Empat) sasaran strategis yang ditetapkan, dikategorikan **cukup berhasil**.

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran tersebut dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat.

Namun demikian, capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang akan menempuh kebijakan pokok dan kebijakan strategis serta kebijakan operasional pembangunan yang diharapkan.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Permasalahan Utama	12
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. RENSTRA.....	14
1. Visi	16
2. Misi	17
3. Tujuan dan Sasaran strategis beserta Indikator Kinerja Utama.....	18
B. Perjanjian Kinerja	21
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Program	25
B. Realisasi Anggaran	28
BAB IV : PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

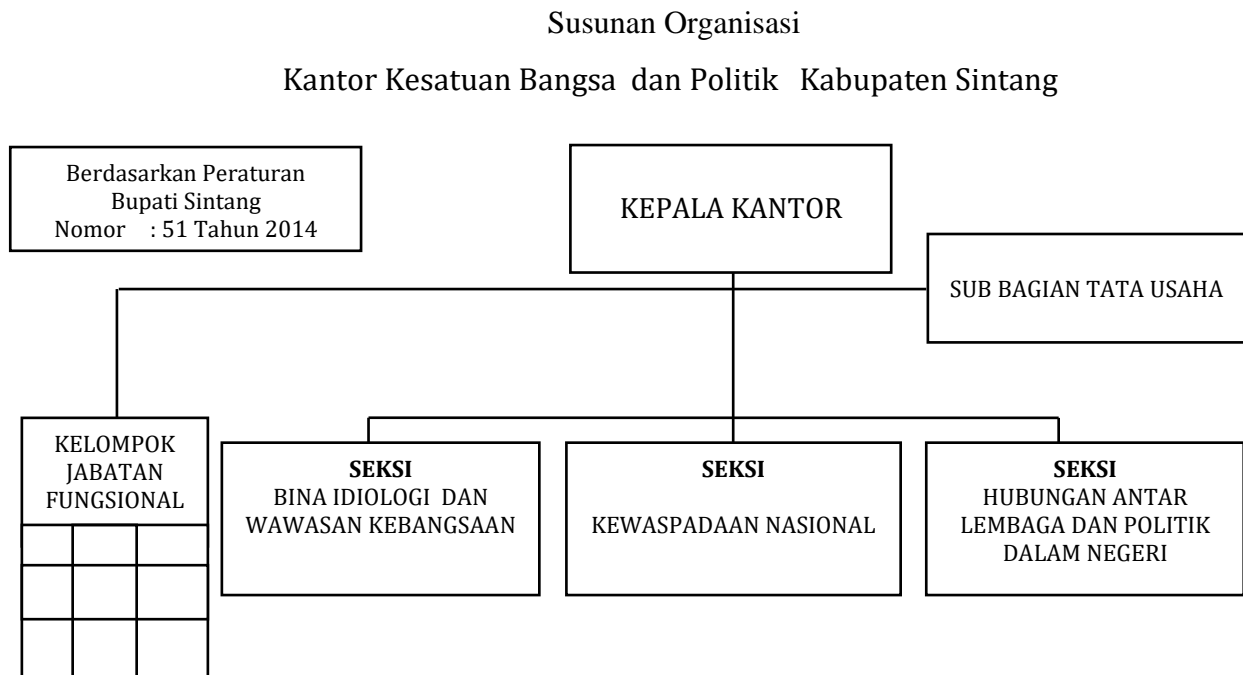
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 51 tahun 2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, Penanganan Konflik, Politik dan Hubungan Antar Lembaga yang di Pimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariats Daerah.

Dalam rangka peningkatan efektivitas,keselarasan,sinergitas serta koordinasi dari Pusat, Provinsi sampai Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik **ditingkatkan menjadi** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang. Terkait dengan perubahan Nomenklatur Kantor menjadi Badan berubah juga susunan organisasi.

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

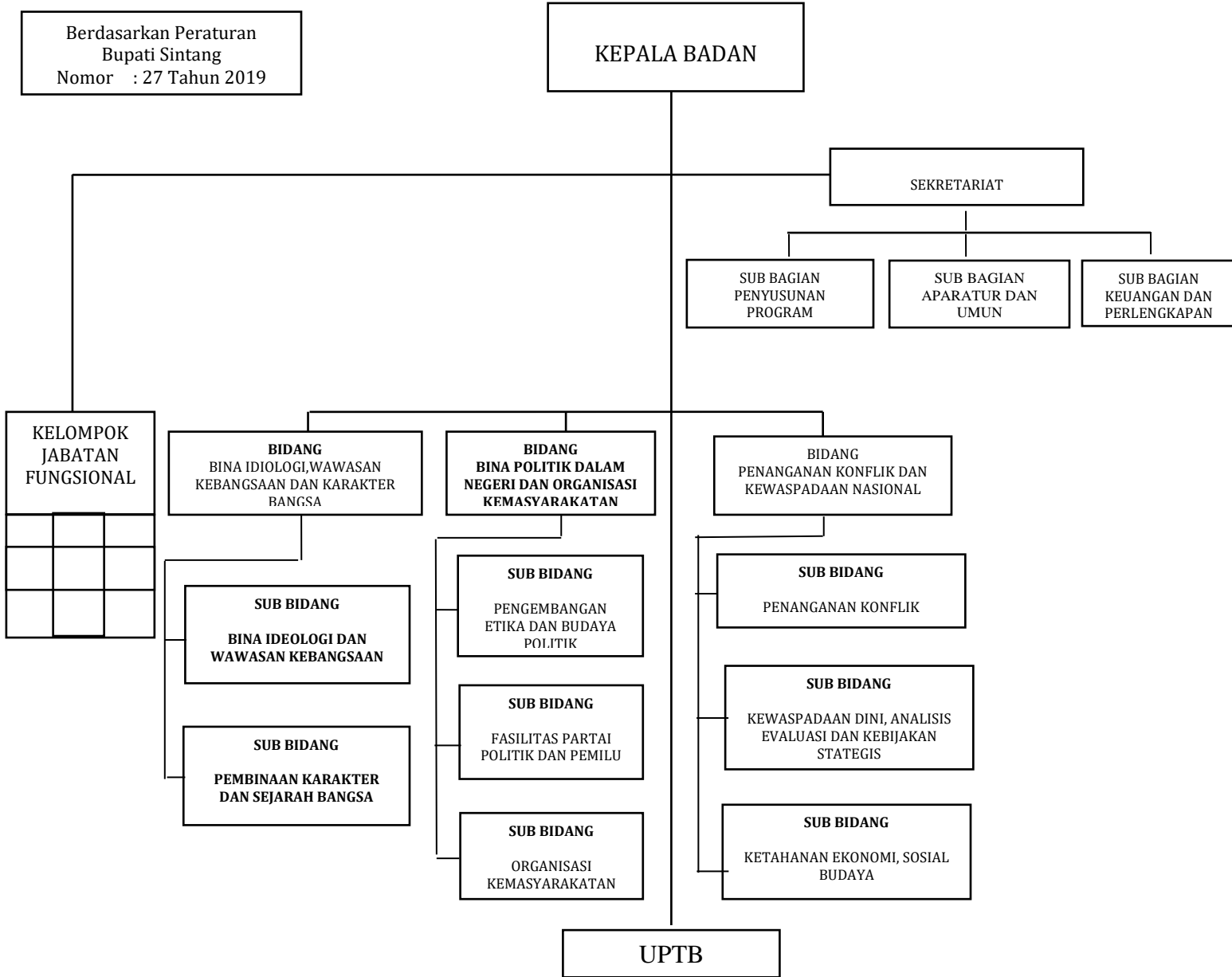
- a. Kepala Kantor
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
- d. Seksi Kewaspadaan Nasional
- e. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik dalam Negeri
- f. Kelompok Jabatan Fungsional



Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setelah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Subbagian Penyusunan Program.
 - Subbagian Aparatur dan Umum
 - Subbagian Keuang dan Perlengkapan
- c. Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri dari :
 - Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
 - Subbidang Pembinaan Karakter dan Sejarah Bangsa.
- d. Bidang Bina Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :
 - Subbidang Pengembangan Etika dan Budaya Bangsa.
 - Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
 - Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
- e. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari
 - Subbidang Penanganan Konflik.
 - Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi dan Kebijakan Starategis.
 - Subbidang Ekonomi, Sosila Budaya.
- f. Unit Pelaksanan Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang yaitu melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Sintang dibidang Kesatuan Bangsa, Politik sesuai dengan kebijakan Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan Pelaksanan Rencana Strategi dan Rencana Kerja Tahunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Perumusan kebijakan Fasilitasi pementapan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang ketatausahaan, bina idiologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan serta politik dalam negeri;
- e. Pelaksanaan pembinaan di bidang idiologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan serta politik dalam negeri;
- f. Pengkoordinasian kebijakan operanasional di bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelijen dan keamanan, politik, bina masyarakat, penanganan konflik social, dan pengawasan orang asing serta lembaga asing.
- g. Pemantauan perkembangan kehidupan demokrasi.
- h. Pengkajian masalah strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- i. Peningkatan kapasitas aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- j. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk oprasional kesatuan bangsa dan politik.
- k. Penyelenggaraan pasilitasi dan pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;

- l. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- m. Penyusunan Penetapan Kinerja di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- n. Penyusunan analisa jabatan;
- o. Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- p. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- q. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Oprasional Prosedur (SOP)dibidang kesatuan bangsa dan politik
- r. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- s. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- t. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
- u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok setelah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang yaitu melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Sintang dibidang Kesatuan Bangsa, Politik sesuai dengan kebijakan Bupati.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
- b. Pelaksanaan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
- f. Pelaksanaan administrasi Badan;
- g. Peningkatan kapasitas Aparatur di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal;
- i. Penyusunan analisis Jabatan;
- j. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar Oprasional Prosedur (SOP)dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik

- k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

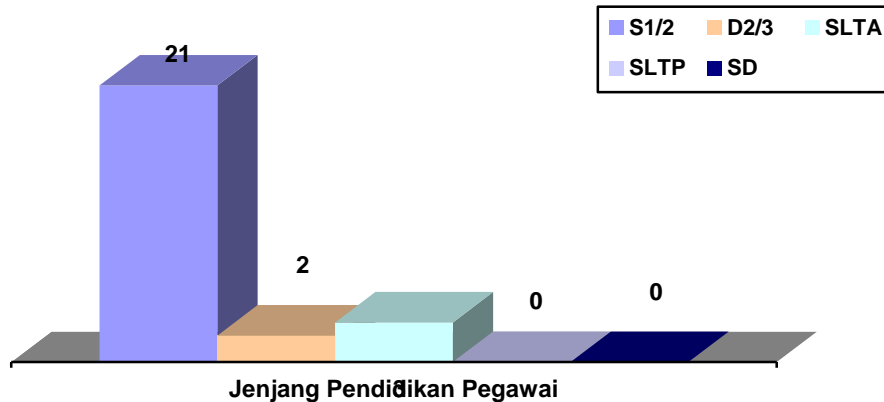
4. Sumber Daya Apartur (SDA)

Dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2019, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten yang didukung jumlah aparatur/ pegawai sebanyak 26 orang. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian, golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian, Golongan dan Jenis Kelamin

NO	STATUS / JENIS KELAMIN	GOL. I				GOL. II				GOL. III				GOL. IV				JUM - LAH
		a	b	c	D	a	b	c	d	a	B	c	d	a	b	c	D	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	PNS	L	-	-	-	-	1		1	-	2	5	4	4	1	-	-	18
		P	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	1	-	-	-	-	8
JUMLAH PNS		0	0	0	0	0	1	1	2	0	6	6	5	4	1	0	0	26
II	CPNS	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH CPNS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH TOTAL		0	0	0	0	0	1	1	2	0	6	6	5	4	1	0	0	26

Sedangkan berdasarkan jenjang pendidikan pegawai dapat digambarkan



Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan dan Pengembangan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai kegiatan, pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan urusan, tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

5. Sumber Daya Keuangan

Dalam Pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Keuangan Ada beberapa Tugas pokok dan Fungsi yang berkaitan dengan Management Keuangan dengan Pelaksanaan Tugas yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan
3. Bendahara
4. Pengurus Barang Pengguna

Adapun Tugas dan Tanggung Jawab antara lain :

- Pengguna Anggaran bertugas dan bertanggung Jawab atas Penggunaan dan pelaksanaan Anggaran yang ada di SKPD.

- Pejabat Penatausahaan Keuangan bertugas dan bertanggung Jawab atas Anggaran berdasarkan Kebutuhan SKPD, membuat Laporan Keuangan, memverifikasi SPJ serta melaporkan Realisasi Anggaran kepada Pengguna Anggaran.
- Bendahara Pengeluaran bertugas mencairkan Uang, membuat Spj Fungsional serta membukukan semua pengeluaran dan Pemasukan.
- Pengurus barang Pengguna melakukan Verifikasi Aset tetap, mengusulkan RKBU berdasarkan Kebutuhan

6. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang. Hingga saat ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang memiliki sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Untuk prasarana gedung kantor, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik telah memiliki gedung sendiri yang bersifat permanen cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Inventaris Kantor

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah Gedung Kantor	2.476 m ²	
2.	Gedung	1 Buah	
3.	Kendaraan Roda Empat	2 Buah	
4.	Kendaraan Roda Dua	13 Buah	

5.	Komputer	10 Buah	
6.	Laptop	8 Buah	
7.	Printer	8 Buah	
8.	Meja Biro	9 Buah	
9.	Meja ½ Biro	15 Buah	
10.	Kursi Tamu	6 Set	
11.	Kursi putar	20 Buah	
12.	Kursi Rapat	115 Buah	
13.	Lemari Besi	21 Buah	
14.	Filing Kabinet	6 Buah	
15.	Alat Pemadam Kebakaran	4 Buah	
16.	Kulkas	1 Buah	
17.	Mic miting	4 Set	
18.	LCD Proyektor	2 Buah	
19.	Handy Cam	1 Buah	
20.	Kamera Film	1 Buah	
21.	AC	15 Buah	
22.	Kipas Angin	6 Buah	
23.	Tip Mini compo	1 Buah	
24.	Mesin Tik	2 Buah	
25.	TV	2 Buah	
26.	Suond Sistem	2 Buah	
27.	Tangga	1 Buah	
28.	Telepon	1 Buah	

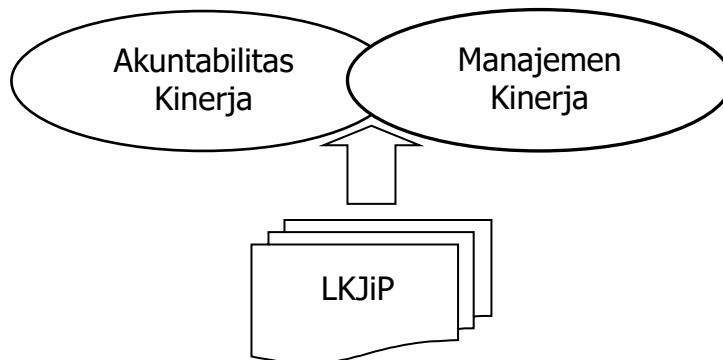
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Laporan Kinerja Instansi pemerintah Tahunan disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. LKJiP merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan yang kami susun memiliki dua fungsi, **Pertama**, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh *stakeholders*. **Kedua**, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LKJiP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKJiP oleh setiap instansi pemerintah.

Gambar I.1.

Maksud dan Tujuan Penyusunan LKJiP 2019



Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKJiP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang mencakup hal-hal sebagai berikut :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJiP 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2019. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2019.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJiP 2019 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Perencana Kinerja Pembangunan yang tertuang dalam RENSTRA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang adalah Kabupaten Sintang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan Politik dan Ketahanan Bangsa serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

Perencanaan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Kantor pada setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolak ukur, yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Agar Perencanaan Kinerja yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan oleh segenap pegawai yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang.

Perencanaan Kinerja ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan situasi yang terjadi baik bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Guna merealisasikan dan mewujudkan Visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, kemudian, misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis, dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang merupakan proses penyusunan rencana kinerja untuk suatu tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal setiap tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan. Selain itu, juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijaksanaan, dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kerjanya, sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA).

Laporan Kinerja Tahunan (LKJiP) Tahun 2019 merupakan implementasi Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang sebelumnya, sebagai tolok ukur pelaporan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang pada Tahun 2019 ini.

1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*).

**“TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA YANG
KOKOH PADA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG MELALUI
KEHIDUPAN YANG DEMOKRATIS BERWAWASAN KEBANGSAAN,
DAMAI DAN TENTRAM”**

Ada empat kata kunci dalam visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang 2016-2021, yaitu:

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Yang Kokoh artinya bahwa menguatnya suasana kehidupan yang majemuk (didalamnya mencakup macam-macam corak yang beraneka ragam baik dari dilihat dari asal usul, suku, agama, kebudayaan, kelompok dan sebagainya) menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi
2. Kehidupan yang berwawasan kebangsaan artinya suasana kehidupan dimana baik individu, kelompok maupun sistem kemasyarakatan memiliki cara pandang mengenai diri dan lingkungan berdasarkan ide Nasional yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

3. Kehidupan yang Damai dan Tentram artinya bahwa suasana kehidupan dalam masyarakat yang harmoni-konstruktif tanpa adanya konflik, perseteruan ataupun perselisihan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kehidupan yang Demokratis artinya suasana kehidupan masyarakat yang dicirikan oleh adanya partisipasi secara aktif dan cerdas dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik serta mampu menyampaikan pendapat, aspirasi dan kritik secara santun dan cerdas untuk kepentingan bangsa dan negara.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi organisasi. Misi merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Keutuhan NKRI yang berlandaskan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Yang Kokoh.
- 2) Mengembangkan wawasan kebangsaan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan (hankam).
- 3) Memperkuat kehidupan sosial yang damai dalam bingkai keragaman daerah (Multikulturalisme).
- 4) Memantapkan sistem politik daerah yang demokratis serta keserasian hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel.

3. Keterkaitan Visi dan Misi

Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Visi terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang Kokoh berhubungan secara fungsional dengan Misi 1 yaitu Memperkuat Keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45.
2. Visi terwujudnya Kehidupan yang berwawasan kebangsaan berhubungan secara fungsional dengan Misi 2 yaitu Mengembangkan wawasan kebangsaan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam.
3. Visi terwujudnya Kehidupan yang Damai berhubungan secara fungsional dengan Misi 3 yaitu Memperkuat kehidupan sosial yang damai dalam bingkai keragaman daerah
4. Visi terwujudnya Kehidupan yang Demokratis berhubungan secara fungsional dengan Misi 4 yaitu Memantapkan sistem politik daerah yang demokratis serta keserasian hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja utama

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Pernyataan tujuan dan sasaran yang dipaparkan pada tabel berikut :

Tujuan

1. Terwujudnya Keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945
2. Mengembangkan wawasan kebangsaan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Memperkuat kehidupan Sosial yang damai dalam bingkai keragaman daerah.
4. Terwujudnya sistem politik daerah yang demokratis
5. Terwujudnya keserasian hubungan legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel.

Sasaran

1. Meningkatnya stabilitas daerah yang aman dan kondusif
2. Menguatnya jiwa dan semangat nasionalisme dalam masyarakat
3. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek politik
4. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek ekonomi
5. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek sosial
6. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek budaya
7. Terciptanya kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.
8. Berkurangnya potensi ancaman terjadinya konflik dan pertikaian dalam masyarakat.
9. Meningkatnya kapasitas kelembagaan politik di daerah
10. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat
11. Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat secara berkelanjutan.
12. Terlaksananya hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel.
13. Terlaksananya Diskusi Politik Kabupaten Sintang.
14. Terlaksananya pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Pendataan, Pembinaan, Penertiban Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat) di Kabupaten Sintang.
15. Terlaksananya penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Sintang.
16. Terlaksananya Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sintang.

Strategis

1. Startegis Pembinaan Kebangsaan (Nation Building)
2. Strategis Penguatan Kapasitas Supra Struktur Politik dan Infra Struktur Politik Daerah.
3. Strategis Pemberdayaan Masyarakat dalam Melaksanakan Perlindungan Sosial.
4. Strategis Penguatan Kapasitas supra Struktur Politik dan Infra Struktur Politik Daerah

Indikator Kinerja Utama

1. Terdeteksinya Situasi dan kondisi Ideologi, Politik, Sosial dan Budaya, Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.
2. Terwujudnya pemahaman wawasan masyarakat terhadap makna wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 3 Mewujudkan Pemahaman Forum-Forum Pengembangan Wawasan Kebangsaan tentang Politik Dalam Negeri.
- 4 Terjalannya hubungan komunikasi yang semakin intensif antara lembaga politik, Organisasi kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat dan Kelompok Masyarakat.
5. Terlaksananya Verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada Parpol yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sintang.
6. Terlaksananya Forum Diskusi Politik
7. Terlaksananya pemberdayaan kepada Organisasi Kemasyarakatan.
8. Toleransi Antar Umat Beragama

B. PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	<p>Startegis Pembinaan Kebangsaan (Nation Building)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya stabilitas daerah yang aman dan kondusif 2. Menguatnya jiwa dan semangat nasionalisme dalam masyarakat 	<p>Terdeteksinya Situasi dan kondisi Ideologi, Politik, Sosial dan Budaya, Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.</p>	90 %
2.	<p>Strategis Penguatan Kapasitas Supra Struktur Politik Dan Infra Struktur Politik Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek politik 2. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek ekonomi 3. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek sosial 4. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek budaya 	<p>Terwujudnya pemahaman wawasan masyarakat terhadap makna wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p> <p>Mewujudkan Pemahaman Forum-Forum Pemngembangan Wawasan Kebangsaan tentang Politik dalam Negeri</p>	90 %
3.	<p>Strategis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Melaksanakan Perlindungan Sosial.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. 2. Berkurangnya potensi ancaman terjadinya konflik dan pertikaian dalam masyarakat. 	<p>Terjalinnnya hubungan komunikasi yang semakin intensif antar lembaga politik, Organisasi kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat dan Kelompok Masyarakat.</p>	90 %
4.	<p>Strategis Penguatan Kapasitas Supra Struktur Politik Dan Infra Struktur Politik Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan politik di daerah 2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat 3. Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat secara berkelanjutan. 4. Terlaksananya hubungan kerja antara 	<p>Terlaksananya verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada Parpol yg memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sintang.</p> <p>Terlaksananya Forum Diskusi Politik.</p> <p>Terlaksananya pemberdayaan kepada Organisasi Kemasyarakatan</p>	90 %

	<p>legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel.</p> <p>5. Terlaksananya Diskusi Politik Kabupaten Sintang.</p> <p>6. Terlaksananya pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Pendataan, Pembinaan, Penertiban Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat) di Kabupaten Sintang.</p> <p>7. Terlaksananya penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Sintang.</p> <p>8. Terlaksananya Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB) Kabupaten Sintang</p>	Toleransi Antar Umat Beragama	
--	---	-------------------------------	--

NO	Uraian/Program Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	670.030.130,00	APBD
	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	APBD
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	32.208.000,00	APBD
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.000.000,00	APBD
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.000.000,00	APBD
	Penyediaan alat tulis kantor	45.000.000,00	APBD
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.000.000,00	APBD
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.320.000,00	APBD
	Penyediaan makanan dan minuman	28.934.000,00	APBD
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	201.820.000,00	APBD
	Rapat Koordinasi Pembinaan Kedalam Daerah	102.765.730,00	APBD
	Penyediaan Tenaga Kontrak	152.990.400,00	APBD
	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	49.992.000,00	APBD
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	178.220.650,00	APBD

	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	14.245.000,00	APBD
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.640.000,00	APBD
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	100.000.000,00	APBD
	Pemeliharaan Ruti/Berkala kendaraan dina operasional	18.450.000,00	APBD
	Pemeliharaan Ruti/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	14.895.650,00	APBD
	Pemeliharaan Ruti/Berkala Perangkat Komputer dan Printer	10.990.000,00	APBD
III	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	61.040.000,00	APBD
	Pendidikan dan pelatihan formal	61.040.000,00	APBD
IV	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	697.823.500,00	APBD
	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Pencegahan Tindak Kejahatan di Kabupaten Sintang	54.301.000,00	APBD
	Penanganan Konflik Sosial	643.522.500,00	APBD
V	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	23.059.500,00	APBD
	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	23.059.500,00	APBD
VI	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	108.765.500,00	APBD
	Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	108.765.500,00	APBD
VII	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	53.171.000,00	APBD
	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	53.171.000,00	APBD
VIII	Program Pendidikan Politik Masyarakat	230.538.520,00	APBD
	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	47.507.200,00	APBD
	Tim Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan Administrasi Partai Politik (bantuan Keuangan Parpol)	87.451.000,00	APBD
	Pemantauan Penetapan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Sintang	95.580.320,00	APBD
IX	Program Fasilitasi Peningkatan Demokrasi dan Pemilu	350.066.550,00	APBD
	Sosialisasi Pilkada Serentak (Pemilihan Bupati/Wakil	200.041.000,00	APBD

Bupati Sintang)		
Monitoring Distribusi Logistik dan Posko Pelaksanaan Pemilu Serentak	150.025.550,00	APBD
X Program Pelaksanaan Koordinasi Intelejejen Daerah	154.982.600,00	APBD
Tim Kewaspadaa Dini Pemerintah Daerah	154.982.600,00	APBD

Sintang, Januari 2019



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja, dan metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran.

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1.	Startegis Pembinaan Kebangsaan (Nation Building) 1. Meningkatnya stabilitas daerah yang aman dan kondusif 2. Menguatnya jiwa dan semangat nasionalisme dalam masyarakat	Terdeteksinya Situasi dan kondisi Ideologi, Politik, Sosial dan Budaya, Kemanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.	12 Kec	12 Kec	100
2.	Strategis Penguatan Kapasitas Supra Struktur Politik Dan Infra Struktur Politik Daerah 1. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek politik 2. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek ekonomi 3. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek sosial 4. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek budaya	Terwujudnya pemahaman wawasan masyarakat terhadap makna wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mewujudkan Pemahaman Forum-Forum Pemngembangan Wawasan Kebangsaan tentang Politik dalam Negeri	95% 80%	95% 80%	100 100
3.	Strategis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Melaksanakan Perlindungan Sosial. 1. Terciptanya kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. 2. Berkurangnya potensi ancaman terjadinya konflik dan pertikaian dalam masyarakat.	Terjalannya hubungan komunikasi yang semakin intensif antar lembaga politik, Organisasi kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat dan Kelompok Masyarakat.	95%	95%	100
4.	Strategis Penguatan Kapasitas Supra Struktur Politik Dan Infra Struktur				

	<p>Politik Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan politik di daerah 2. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat 3. Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat secara berkelanjutan. 4. Terlaksananya hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel. 5. Terlaksananya Diskusi Politik Kabupaten Sintang. 6. Terlaksananya pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Pendataan, Pembinaan, Penertiban Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat) di Kabupaten Sintang. 7. Terlaksananya penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Sintang. 8. Terlaksananya Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB) Kabupaten Sintang 	<p>Terlaksananya verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada Parpol yg memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sintang.</p> <p>Terlaksananya Forum Diskusi Politik.</p> <p>Terlaksananya pemberdayaan kepada Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>Toleransi Antar Umat Beragama</p>	<p>10 Parpol</p> <p>1.850</p> <p>118</p>	<p>10 Parpol</p> <p>1.850</p> <p>118</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>
--	---	--	--	--	----------------------------------

Dikarenakan keterbatasan anggaran maka target kinerja tidak dapat dilakukan dengan maksimal

Didukung dengan :

- a. Analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya;
- b. Analisis Program /kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan penyampaian pernyataan kinerja.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan startegis organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target 2021
			2016	2017	2018	
1.	Startegis Pembinaan Kebangsaan (Nation Building) 1. Meningkatnya stabilitas daerah yang aman dan kondusif 2. Menguatnya jiwa dan semangat nasionalisme dalam masyarakat	Terdeteksinya Situasi dan kondisi Ideologi, Politik, Sosial dan Budaya, Kemanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.	12 Kec	12 Kec	12 Kec	100%
2.	Strategis Penguatan Kapasitas Supra Struktur Politik Dan Infra Struktur Politik Daerah 1. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek politik 2. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek ekonomi 3. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek sosial 4. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam aspek budaya	Terwujudnya pemahaman wawasan masyarakat terhadap makna wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	95%	70%	95%	100%
		Mewujudkan Pemahaman Forum-Forum Pemngembangan Wawasan Kebangsaan tentang Politik dalam Negeri	75%	70%	80%	100%
3.	Strategis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Melaksanakan Perlindungan Sosial. 1. Terciptanya kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. 2. Berkurangnya potensi ancaman terjadinya konflik dan pertikaian dalam masyarakat.	Terjalinnnya hubungan komunikasi yang semakin intensif antar lembaga politik, Organisasi kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat dan Kelompok Masyarakat.	80%	95%	95%	100%

4.	<p>Strategis Penguatan Kapasitas Supra Struktur Politik Dan Infra Struktur Politik Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan politik di daerah 2. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat 3. Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat secara berkelanjutan. 4. Terlaksananya hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel. 5. Terlaksananya Diskusi Politik Kabupaten Sintang. 6. Terlaksananya pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Pendataan, Pembinaan, Penertiban Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat) di Kabupaten Sintang. 7. Terlaksananya penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Sintang. 8. Terlaksananya Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sintang 	<p>Terlaksananya verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada Parpol yg memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sintang.</p> <p>Terlaksananya Forum Diskusi Politik.</p> <p>Terlaksananya pemberdayaan kepada Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>Toleransi Antar Umat Beragama</p>	10 Parpol	10 Parpol	10 Parpol	100%
			1.820	1.820	1.850	2.500
			88	98	118	130
			65%	75%	85%	90%

B. REALISASI ANGGARAN

NO	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	6
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.669.229.107,00	1.498.339.764,00	89,76
	Gaji	1.669.229.107,00	1.498.339.764,00	89,76
	BELANJA LANGSUNG	2.527.697.950,00	2.467.664.549,00	97,62
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	670.030.130,00	641.272.143,00	95,71

	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	4.998.000,00	99,96
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	32.208.000,00	27.618.243,00	85,75
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.000.000,00	3.764.400,00	53,78
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	100,0
	Penyediaan alat tulis kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	100,0
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,0
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.320.000,00	3.740.000,00	86,57
	Penyediaan makanan dan minuman	28.934.000,00	28.842.000,00	99,68
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	201.820.000,00	201.820.000,00	100,0
	Rapat Koordinasi Pembinaan Kedalam Daerah	102.765.730,00	102.555.000,00	99,79
	Penyediaan Tenaga Kontrak	152.990.400,00	147.263.400,00	96,26
	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	49.992.000,00	35.671.100,00	71,35
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	178.220.650,00	165.200.100,00	92,69
	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	14.245.000,00	14.245.000,00	100,0
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.640.000,00	19.640.000,00	100,0
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	100.000.000,00	99.676.100,00	99,68
	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional	18.450.000,00	17.854.000,00	96,77
	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	14.895.6500,00	2.795.000,00	18,76
	Pemeliharaan Rutin/berkala Perangkat Komputer dan Printer	10.990.200,00	10.990.200,00	100,0
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	61.040.000,00	60.898.100,00	99,77
	Pendidikan dan pelatihan formal	61.040.000,00	60.898.100,00	99,77
4	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	697.823.500,00	695.938.500,00	99,73
	Peningkatan Kerja sama dengan Aparat keamanan dalam Pencegahan Tindak Kejahatan di Kabupaten Sintang	54.301.000,00	52.706.000,00	97,06
	Penanganan Konflik Sosial	643.522.500,00	643.232.500,00	99,95
5	Program pengembangan wawasan kebangsaan	23.059.500,00	22.872.500,00	99,19
	Revitalisas, Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila	23.059.500,00	22.872.500,00	99,19

6	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	108.765.500,00	101.402.227,00	93,23
	Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan(FPK)	108.765.500,00	101.402.227,00	93,23
7	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat(Pekat)	53.171.000,00	52.253.500,00	98,27
	Penyuluhan Pencegahan Peredaran /Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	53.171.000,00	52.253.500,00	98,27
8	Program pendidikan politik masyarakat	230.538.520,00	228.490.729,00	99,11
	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	47.507.200,00	47.272.200,00	99,51
	Tim Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan Administrasi Partai Politik (bantuan Keuangan Parpol)	87.451.000,00	85.741.800,00	98,05
	Pemantuan Penetapan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Sintang	95.580.320,00	95.476.729,00	99,89
9	Program Fasilitasi Peningkatan Demokrasi dan Pemilu	350.066.550,00	347.736.650,00	99,33
	Sosialisasi Pilkada Serentak (Pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Sintang)	200.041.000,00	198.666.100,00	99,31
	Monitoring Distribusi Logistik dan Posko Pelaksanaan Pemilu Serentak	150.025.550,00	149.070.550,00	99,36
10	Program Pelaksanaan Koordinasi Intelejejen Daerah	154.982.600,00	151.600.100,00	97,82
	Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	154.982.600,00	151.600.100,00	97,82
Jumlah alokasi belanja langsung		2.527.697.950,00	2.467.664.549,00	97,62

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan (LKJiP) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang Tahun 2019 merupakan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima sebagaimana tercermin dalam tugas pokok dan fungsinya tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Selain itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dikelola dalam bentuk dana, personil, sarana prasarana serta faktor-faktor pendukung lainnya.

Dalam Tahun Anggaran 2019, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang melaksanakan 10 program yang meliputi 30 kegiatan untuk mencapai 4 (Empat) sasaran strategis dalam rangka mencapai misi dan visi yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan perkembangan dinamika masyarakat telah ditetapkan anggaran, untuk membiayai program dan kegiatan di atas, yang dituangkan dalam APBD Tahun 2019 sebesar Rp Rp.2.527.697.950,- (setelah perubahan). Dari jumlah anggaran tersebut telah direalisasikan untuk kegiatan atau direalisasikan sebesar 97,62%.

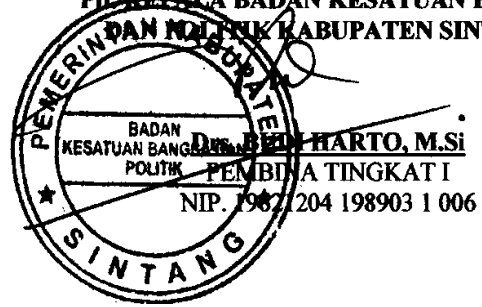
Mengingat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, maka penilaian kinerja masih cenderung pada level indikator output dan outcomes. Capaian sasaran Tahun 2019 berdasarkan indikator yang ditetapkan sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 4 (Empat) sasaran startegis yang ditetapkan, **sangat berhasil**.

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran tersebut dipengaruhi oleh adanya upaya kerja keras Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat .

Namun demikian, capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi.

Sintang, Februari 2020

**PILIH KETUA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG**



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Formulir Pengukuran Kinerja

PERANGKAT DAERAH : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. SINTANG

Tahun Anggaran : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1.	<p><i>Strategis Pembinaan Kebangsaan (Nation Building)</i></p> <p>1. Meningkatkan stabilitas daerah yang aman dan kondusif</p> <p>2. Menguatnya jiwa dan semangat nasionalisme dalam masyarakat</p>	<p><i>Terdeteksinya Situasi dan kondisi Ideologi, Politik, Sosial dan Budaya, Kemanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.</i></p>	12 Kec	12 Kec	100
2.	<p><i>Strategis Penguatan Kapasitas Supra Struktur Politik Dan Infra Struktur Politik Daerah</i></p> <p>1. Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam aspek politik</p> <p>2. Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam aspek ekonomi</p> <p>3. Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam aspek sosial</p> <p>4. Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam aspek budaya</p>	<p><i>Terwujudnya pemahaman wawasan masyarakat terhadap makna wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</i></p> <p><i>Mewujudkan Pemahaman Forum-Forum Pengembangan Wawasan Kebangsaan tentang Politik dalam Negeri</i></p>	95%	95%	100
3.	<p><i>Strategis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Melaksanakan Perlindungan Sosial.</i></p> <p>1. Terciptanya kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.</p> <p>2. Berkurangnya potensi ancaman terjadinya konflik dan pertikaian dalam masyarakat.</p>	<p><i>Terjalannya hubungan komunikasi yang semakin intensif antar lembaga politik, Organisasi kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat dan Kelompok Masyarakat.</i></p>	95%	95%	100
4.	<p><i>Strategis Penguatan Kapasitas Supra Struktur Politik Dan Infra Struktur Politik Daerah</i></p> <p>1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan politik di daerah</p> <p>2. Meningkatkan partisipasi politik</p>	<p><i>Terlaksananya verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada Parpol yg memperoleh kursi</i></p>	10 Parpol	10 Parpol	100

<p>masyarakat</p> <p>3. Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat secara berkelanjutan.</p> <p>4. Terlaksananya hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif daerah dalam tata pemerintahan daerah yang baik, bersih, berwibawa dan akuntabel.</p> <p>5. Terlaksananya Diskusi Politik Kabupaten Sintang.</p> <p>6. Terlaksananya pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Pendataan, Pembinaan, Penertiban Organisasi Kemasyarakatan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat) di Kabupaten Sintang.</p> <p>7. Terlaksananya penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Sintang.</p> <p>8. Terlaksananya Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sintang</p>	<p>di DPRD Kabupaten Sintang.</p> <p>Terlaksananya Forum Diskusi Politik.</p> <p>Terlaksananya pemberdayaan kepada Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>Toleransi Antar Umat Beragama</p>	<p>1.820</p> <p>118</p> <p>75%</p>	<p>1.820</p> <p>118</p> <p>85%</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>90%</p>
--	---	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

- Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2019 : Rp. 2.527.697.950,-
- Jumlah Realisasi Anggran Sasaran Strategis Tahun 2019 : Rp. 2.467.664.549,-

Sintang, Februari 2020

